

994 AHLI WARIS DI SUKOHARJO TERIMA SANTUNAN KEMATIAN, ANGGARANNYA SEDOT MILIARAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:1032x679/0x0/webp/photo/p2/84/2024/03/13/KANAN-SANTUNAN-KEMATIAN-2528741221.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Santunan kematian tahap I 2024 cair senilai Rp 2.982.000.000. Bantuan ini menyasar 994 ahli waris yang meninggal dunia. Masing-masing menerima Rp 3.000.000. Bantuan secara simbolis disalurkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani di Taman Budaya Suryani, belum lama ini.

Etik menjelaskan, bantuan ini usulan sejak Agustus-November 2023. Bantuan sosial uang duka ini perwujudan salah satu program kerja di era kepemimpinannya. Menyasar ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia. Terutama yang latar belakangnya kurang mampu atau miskin. Serta masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Tersebar di 12 kecamatan di Sukoharjo. Kepada ahli waris penerima bantuan, saya berharap uang santunan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah amanah bagi panjenengan (kalian) semua,” ucap Etik.

Terkait bantuan sosial uang duka, masing-masing kecamatan berbeda alokasinya. Rinciannya, Kecamatan Baki dialokasikan Rp 204 juta untuk 68 ahli waris, Bendosari Rp 192 juta untuk 64 ahli waris, dan Bulu Rp 165 juta untuk 55 ahli waris.

Kemudian Kecamatan Rp 171 juta untuk 57 ahli waris, Grogol Rp 345 juta untuk 115 ahli waris, Kartasura Rp 201 juta untuk 67 ahli waris, serta Mojolaban Rp 297 juta untuk 99 ahli waris. Berikutnya Kecamatan Nguter Rp 195 juta untuk 65 ahli waris, Polokarto Rp

447 juta untuk 149 ahli waris, Sukoharjo Rp 180 juta untuk 60 ahli waris, Tawang Sari Rp 315 juta untuk 105 ahli waris, serta Weru Rp 270 juta untuk 90 ahli waris. (kwl/fer)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/844436811/994-ahli-waris-di-sukoharjo-terima-santunan-kematian-anggarannya-sedot-miliaran>, “994 Ahli Waris di Sukoharjo Terima Santunan Kematian, Anggarannya Sedot Miliaran”, tanggal 13 Maret 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/sukoharjonews/128126/sebanyak-994-ahli-waris-gakin-meninggal-di-sukoharjo-terima-santunan-kematian-masing-masing-rp3-juta>, “Sebanyak 994 Ahli Waris Gakin Meninggal di Sukoharjo Terima Santunan Kematian, Masing-masing Rp3 Juta”, tanggal 9 Maret 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.³ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁴ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁶

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi